

PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

**(Studi pada masyarakat nagari terisolir Kecamatan Batang Kapas
Kabupaten Pesisir Selatan)**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan sebagai salah satu persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



Oleh :

**YOZI DAHFIL PUTRA
84616/2007**

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun (Studi pada masyarakat nagari terisolir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan)**

Nama : YOZI DAHFIL PUTRA

TM/NIM :2007/84616

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Januari 2015

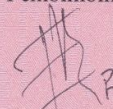
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Akmal, SH. M.Si
NIP. 19620704 198803 2 003

Pembimbing II



Estika Sari, SH
NIP. 19670517 199403 2 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

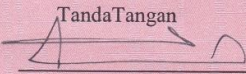
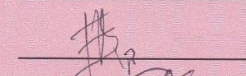
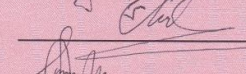
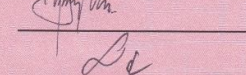
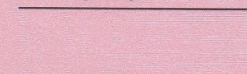
Pada hari Rabu 21 Januari 2015 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB


Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
(Studi pada masyarakat nagari terisolir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten
Pesisir Selatan)

Nama : YOZI DAHFIL PUTRA
TM/NIM : 2007/84616
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Januari 2015

Tim Penguji :

	Nama	TandaTangan
Ketua	: Dr. Akmal, SH. M.Si	
Sekretaris	: Estika Sari, SH	
Anggota	: Dra. Hj. Aina, M.Pd	
Anggota	: Henni Muchtar, SH. M.Hum	
Anggota	: Dr. Susi Fitria Dewi, S.Sos. M.Si	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOZI DAHFIL PUTRA
Nim/Tahun Masuk : 84616/2007
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun ”(Studi pada Nagari terisolir di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan)”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 20 Januari 2015
Saya Yang Menyatakan



YOZI DAHFIL PUTRA
NIM. 84616/2007

ABSTRAK

Yozi Dahfil Putra. NIM 84616. Pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun ”(Studi pada Nagari terisolir di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan). Skripsi. Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP, 2015

Latar belakang yang mendasari pemerintah untuk mencanangkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun bertujuan agar anak-anak di Indonesia mendapatkan bekal untuk masa depan yang lebih baik, dimana anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak, yang mewajibkan anak-anak Indonesia mengikuti pendidikan selama 12 tahun atau hingga lulus SLTA/SMA sederajat.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas. Informan penelitian ditentukan berdasarkan teknik *snowball sampling* (Bola Salju) sehingga informan berjumlah 17 orang. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, Klasifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Penelitian ini menemukan: 1) Pelaksanaan program wajib belajar di Nagari Taluk telah dapat dilaksanakan maksimal karena fasilitas yang mendukung program tersebut, yaitu adanya SD, SMP dan SMA, 2) Faktor-faktor pendorong Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di nagari terisolir di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, umumnya berasal dari pandangan orangtua tentang nilai anak yang positif, persepsi yang baik terhadap pendidikan serta kondisi sosial ekonomi yang berada dalam kondisi sedang dan 3) Kiat pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya adalah sosialisasi, pengadaan sarana dan prasarana penunjang dan monitoring kegiatan program wajib belajar 12 tahun

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat ilmu dan kesabaran kepada penulis. Dengan ramah tamah dan hidayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun ”(Studi pada Nagari terisolir di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan).**

Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan berkat bantuan dari dosen pembimbing dan semua pihak, akhirnya tulisan ini terwujud sebagai mana adanya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si Ph.D dan Ibu Heni Muchtar, SH, M.Hum selaku ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Akmal, SH., M.Si dan Ibu Estika Sari, SH yang telah memberikan dorongan, informasi, petunjuk dan arahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si, Ibu Henni Muchtar, SH., M. Hum dan Ibu Dra. Hj. Aina, M.Pd selaku tim penguji di Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberi saran perbaikan demi kesempurnaan skripsi.

5. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
6. Staf pengajar Jurusan Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu dan bimbingan.
7. Mahasiswa/i Jurusan/Program Studi Ilmu Sosial Politik selingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Semoga semua yang diberikan kepada penulis mendapat ridho dari Allah SWT amin. Penulis menyadari walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis mohon maaf dan selalu mengharapkan informasi baik berupa saran ataupun kritikan dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis.....	11
1. Program Wajib Belajar	11
2. Faktor-Faktor yang terkait dengan Pelaksanaan Program Wajib Relajar 12 Tahun.....	19
B. Kerangka Konseptual	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Informan Penelitian	31

D. Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	32
E. Alat Pengumpulan Data.....	35
F. Uji Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
1. Temuan Umum.....	38
2. Temuan Khusus.....	44
a. Pelaksanaan program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di nagari terisolir di Kecamatan Batang Kapas kabupaten Pesisir Selatan.....	44
b. Faktor-faktor pendorong Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di nagari terisolir di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	52
c. Kiat-kiat dalam Menyukkseskan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di nagari terisolir di Kecamatan Batang Kapas kabupaten Pesisir Selatan	62
B. Pembahasan	64
1. Pelaksanaan program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di nagari terisolir di Kecamatan Batang Kapas kabupaten Pesisir Selatan.....	64
2. Faktor-faktor pendorong Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di nagari terisolir di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	65
3. Kiat-kiat dalam Menyukkseskan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di nagari terisolir di Kecamatan Batang Kapas kabupaten Pesisir Selatan	66

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel. 1	Jumlah Anak Usia Sekolah di Kecamatan Batang Kapas tahun 2013..... 6
Tabel. 2	Sarana Pendidikan di Kecamatan Batang Kapas tahun 2013 7
Tabel.3	Informan Penelitian 32
Tabel. 4	Penduduk Nagari Taluk Menurut Kampung tahun 2013..... 40
Tabel. 5	Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di nagari Taluk tahun 2013 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar .2.1 Kerangka Konseptual.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Informan Penelitian
3. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Sain (IPTKS) membawa peranan perubahan di dalam tatanan kehidupan. Di era globalisasi setiap negara harus mampu meningkatkan mutu agar negara tersebut tidak menjadi daerah yang tertinggal, oleh sebab itu negara harus mengupayakan dan meningkatkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya manusia. Indonesia adalah negara yang terkenal akan Sumber Daya Alam, namun pada kenyataannya kemiskinan masih melanda masyarakat Indonesia. Terlihat sekali bahwa Sumber Daya Manusia masih dipertanyakan, maka untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Indonesia salah satu cara yaitu melalui pendidikan.

Manusia membutuhkan Pendidikan dalam kehidupannya, dengan memiliki pendidikan maka manusia dapat mengembangkan potensinya baik disegala bidang. Seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pembangunan Sumber daya manusia dapat dilakukan dengan sektor formal dan informal. Dalam sektor yang formal, pendidikan dilakukan

bertingkat, seperti sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi dan pendidikan informal seperti pelatihan, Balai Latihan Kerja dan lain sebagainya.

Sejatinya memperoleh pendidikan dan melakukan kegiatan belajar adalah hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini ditegaskan dalam batang tubuh, dan diperjelas lagi di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 1945 pasal 31 yang menyatakan (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Dasar 1945 tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan wajib belajar.

Wajib belajar adalah suatu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh setiap warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia agar dapat mengembangkan potensi dirinya untuk dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pertama kali di luncurkan pada tahun 1984 dengan nama kebijakan wajib belajar 6 (enam) tahun di jenjang sekolah dasar atau sederajatnya. Kemudian pada tahun 1994 pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, dan terakhir pada tahun 2013 ini dikeluarkan kebijakan untuk wajib belajar 12 (dua belas) tahun, yaitu setiap warga negara Indonesia (WNI) diwajibkan

menempuh pendidikan sampai jenjang SMA (sekolah menengah atas) atau sederajatnya.

Di Indonesia pemerintah telah membuat undang-undang tentang wajib pendidikan selama 12 tahun yang akan mulai pada tahun ajaran 2013/2014. Terciptanya Undang-undang tersebut tak lepas dari peran pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan yang bertujuan agar anak-anak di Indonesia mendapatkan bekal untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu latar belakang pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut adalah agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak, seperti sekarang ini yang mewajibkan anak-anak Indonesia mengikuti pendidikan selama 12 tahun atau hingga lulus SLTA/SMA sederajat.

Program wajib belajar sebelumnya yaitu Program wajib belajar 9 (sembilan) tahun dianggap sebagai langkah yang strategis karena program ini merupakan awal bahwa manusia ditempatkan sebagai faktor terpenting untuk pengembangan kehidupan bangsa. Kebijakan pemerintah dalam penancangan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun dilandasi adanya konsep bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, pendidikan formal memiliki andil yang sangat besar. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dimaksud didasarkan atas pertimbangan bahwa jika seseorang berpendidikan lebih tinggi tentu akan memiliki pengetahuan, kemampuan, serta tata nilai tertentu yang memungkinkan mereka lebih mampu menyerap berbagai informasi termasuk ilmu pengetahuan.

Salah satu latar belakang lain yang mendasari pemerintah untuk mencanangkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, antara lain faktor geografis, perekonomian keluarga, tradisi masyarakat, dan sarana prasarana pendidikan. Faktor geografis yang mendasari karena adanya kenyataan bahwa rakyat Indonesia tersebar di berbagai wilayah yang luar biasa luasnya dan tersebar pada ribuan pulau di seluruh tanah air. Dengan tersebarnya pulau-pulau, mereka sebagian masih hidup secara berkelompok dengan pola hidup yang sederhana dan pandangan yang tradisional. Oleh karena itu sebagian besar mereka yang tinggal di daerah terpencil kurang memperhatikan pentingnya pendidikan.

Keadaan seperti ini merintangi tersebar luasnya kesempatan pendidikan secara merata. Dengan demikian, tidak mengherankan jika ada suatu kelompok masyarakat yang belum memperoleh kesempatan pendidikan ke jenjang SLTP, bahkan sebagian lagi ada yang belum lulus SD. Masalah ini bukan karena anak tidak mau, tapi karena letak tempat tinggal mereka yang tidak mungkin dijangkau sarana pendidikan. Wilayah seperti itu seringkali tidak memungkinkan berlangsungnya usaha pendidikan secara baik, disamping faktor geografis juga usaha menanamkan pengertian tentang pentingnya pendidikan karena pola hidup yang terbelakang.

Daerah terisolir merupakan daerah yang sekarang ini menjadi perhatian oleh negara sebab hak asasi mereka sebagai sesama Warga Negara Indonesia yang tidak terpenuhi salah satunya yaitu mengenai pendidikan. Oleh sebab itu harus ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat setempat dalam

mewujudkan cita-cita dalam mendapatkan pendidikan lebih layak. Hal ini yang dirasakan oleh masyarakat kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, meskipun dengan perkembangan zaman dalam bidang pembangunan namun tetap saja masih ada daerah terpencil yang kurang mendapatkan perhatian didalam segala bidang salah satunya mengenai pendidikan.

Kecamatan Batang Kapas berada di Kabupaten Pesisir Selatan, memiliki 9 nagari (desa adat). Jarak daerah dari ibukota Kabupaten Pesisir selatan sekitar 30 km dengan waktu tempuh 30 menit atau sekitar 100 km dari Kota Padang. Sampai saat ini Kecamatan Batang Kapas memiliki daerah terisolir, hal ini sesuai dengan petunjuk Bappenas, bahwa desa/daerah terisolir atau terisolir memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Geografis, umumnya secara geografis daerah terisolir relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh dipedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil, (2) Sumber daya Alam, beberapa daerah terisolir tidak memiliki potensi sumberdaya alam, (3) Sumber daya Manusia, pada umumnya masyarakat di daerah terisolir mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang, (4) Prasarana dan Sarana, keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya menyebabkan masyarakat didaerah terisolir mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial, (5) Daerah Rawan Bencana dan Konflik Sosial, seringnya suatu daerah mengalami bencana alam dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan

sosial ekonomi, dan (6) Kebijakan Pembangunan, suatu daerah menjadi tertinggal dapat disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat seperti kurang keberpihakan pada pembangunan daerah terisolir.

Masyarakat usia sekolah di Kecamatan Batang Kapas, khususnya di nagari terisolir masih ada yang tidak sekolah. Saat ini ada 16 orang anak yang berada pada usia sekolah tidak mengikuti program wajib belajar atau tidak sekolah, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Anak Usia Sekolah di Nagari Terisolir Kecamatan Batang Kapas tahun 2013

No	Nagari	5 s.d 9 (SD)	10 s.d 14 (SMP)	15 s.d 19 (SMA)	Jumlah	Tidak sekolah
1	Taluak	187 orang	223 orang	203 orang	613 orang	11 orang
2	Taratak Tempatih IV Mudiek	205 orang	239 orang	166 orang	610 orang	1 orang
3	Taluk Tigo Sakato	117 orang	156 orang	111 orang	384 orang	4 orang
	Jumlah				1.607 orang	16 orang

Sumber: Kecamatan Batang Kapas dalam Angka 2013, BPS

Data di atas terlihat jumlah penduduk yang tidak sekolah jumlah sangat sedikit dibandingkan penduduk usia sekolah. Jumlah penduduk Nagari Taluak yang tidak sekolah adalah 1,8% dari jumlah penduduk usia sekolah, berarti program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah telah berhasil. Keberhasilan program ini juga terjadi di daerah/nagari terisolir yang ada di Kecamatan Batang Kapas.

Berhasilnya program wajib belajar di nagari Taluak tidak terlepas dari sarana pendidikan yang terdapat di daerah mereka. Saat ini sarana pendidikan

yang ada di Nagari Taluak terdiri dari SD dan SMP, sementara untuk melanjutkan ke tingkat SMA, masyarakat harus mencari ke daerah lain. Ketersediaan sarana pendidikan berdasarkan nagari di Kecamatan Batang Kapas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Sarana Pendidikan di Kecamatan Batang Kapas tahun 2013

No	Nagari	TK	SD	SMP	SMA
1	IV Koto Hilie	1	5	2	1
2	IV Koto Mudiek	1	4	1	0
3	Taluak	1	3	1	0
4	Koto Nan Duo IV Koto Hilie	0	4	1	0
5	Koto Nan Duo IV Koto Mudiek	1	4	0	0
6	Taratak Tempatih IV Mudiek	1	3	0	0
7	Tuik IV Koto Mudiek	1	3	0	1
8	Sungai Nyali IV Koto Mudiek	1	3	0	0
9	Taluk Tigo Sakato	1	3	0	0
		8	32	5	2

Sumber: Kecamatan Batang Kapas dalam Angka 2013, BPS

Berdasarkan data di atas, Nagari Taluak telah memiliki sarana pendidikan yang mendukung untuk pelaksanaan program wajib belajar sehingga dapat dimanfaatkan oleh penduduk usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikannya.

Dari uraian di atas tentang pendidikan bagi masyarakat di nagari terisolir menjadi hal yang menarik untuk diteliti maka penulis dapat diambil judul mengenai **“Pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun” (Studi pada Nagari terisolir di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan).**

B. Identifikasi Masalah

1. Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun dilaksanakan untuk jenjang SD sampai SMA di Kecamatan Batang Kapas dilaksanakan dengan baik.

2. Pelaksanaan wajib belajar didorong oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat.
3. Sarana dan prasarana pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dipenuhi oleh pemerintah.
4. Persepsi masyarakat terhadap pendidikan mendorong pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.
5. Sumber daya manusia untuk pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun jumlahnya memadai.
6. Upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Pesisir Selatan dalam menuntaskan program pemerintah dalam bidang pendidikan.

C. Pembatasan Masalah

Pembahasan mengenai pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun sangat luas cakupannya, oleh karena itu agar penelitian ini lebih terarah maka permasalahannya dapat dibatasi pada pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Nagari terisolir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat di ambil dari permasalahan yang ada dikemukakan dalam bentuk pertanyaan berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di nagari terisolir kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan?

2. Apakah faktor-faktor pendorong pelaksanaan program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di nagari terisolir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Apakah kiat-kiat keberhasilan program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di nagari terisolir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan di atas maka dapat di uraikan tujuan penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di nagari terisolir Kecamatan Batang Kapas kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong pelaksanaan program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di nagari terisolir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui kiat-kiat keberhasilan program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di nagari terisolir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan pelaksanaan

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sesuai dengan Ilmu pengetahuan maka penelitian ini bermanfaat dalam bidang Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain-lain.

2. Secara Praktis

a. Bagi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas programnya sehingga Hak masyarakat dapat terpenuhi.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman pada masyarakat terpendek tentang program wajib belajar sehingga juga memberikan peluang bagi anak-anak setempat untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

c. Bagi peneliti

Untuk sebagai penambahan ilmu di bidang pendidikan dan menanamkan jiwa Nasionalisme sebagai Calon Guru kelak dapat ikut serta dalam pembangunan Negara salah satunya dibidang pendidikan.